

Artikel : [Akses terbuka/Open Access](#)

DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sitasi : Muhammad & Dima. 2022, JSTAR 2(2), 11-24.

Kronologi naskah.

Submit : 30 November 2022

Revisi : 14 Desember 2022

Diterima : 14 Desember 2022



Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk
Indonesia Maju

REFORMASI BIROKRASI



DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Fadel Muhammad¹, Yuliana Kurniawati Dima²

¹Fungsi Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Indonesia

²Fungsi Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Indonesia

✉email: fadel.muhammad@bps.go.id, dima@bps.go.id

Abstract

The main objective of regional autonomy is to improve public services and bring them closer to fulfilling community needs. This is also reflected in the fiscal decentralization that gives authority to local governments for managing their finances to improve people's welfare. This study wants to find out whether fiscal decentralization based on indicators of regional fiscal independence and aspects of access to clean water, sanitation, population density and unemployment rates can affect welfare in the province of East Nusa Tenggara. Panel data for 2017-2021 is used in this study to get the best parameter estimation model. The results obtained are fiscal decentralization as measured by the independence of PAD on income and spending turns out to have a positive effect on increasing poverty, while other aspects such as clean water, sanitation, population density and unemployment rates partially have a negative effect on increasing people's welfare. Government can optimize budget arrangements for community needs, improving clean water and sanitation infrastructure, birth control, transmigration and urban planning, as well as creating employment opportunities can improve people's welfare.

Keyword: *Fiscal Decentralisation, Poverty, Panel Data Reggresion*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah telah berjalan di Indonesia lebih dari dua dekade didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya (Wasistiono, 1997). Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menetapkan asas desentralisasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Secara konsep, terdapat tiga tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, tujuan politik yang

berupaya untuk mewujudkan demokrasi melalui keterwakilan rakyat pada dewan (DPRD) dan partai politik. Kedua, tujuan administratif dengan adanya pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah mencakup sumber keuangan dan manajemen birokrasi pemerintah daerah. Yang ketiga adalah tujuan ekonomi untuk mengupayakan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dari ketiga tujuan tersebut, mengindikasikan bahwa peran serta pemerintah dan masyarakat daerah

menjadi sangat penting sebagai penerima kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, selain faktor manusia/sumber daya, beberapa faktor lain yang mendukung terwujudnya keberhasilan tujuan otonomi daerah diantaranya keuangan daerah (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan), manajemen birokrasi yang efektif dan efisien sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pembahasan tentang otonomi daerah tidak dapat terlepas dari tujuan ekonomi yang merupakan aspek penting sesuai visi pembangunan Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat makmur yang merata materiil dan spiritual. Kemiskinan saat ini masih menjadi isu utama pembangunan nasional. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih efektif mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi NTT sebagai penerima kewenangan otonomi daerah dari pemerintah pusat terus berbenah dan memperbaiki pelayanan publik demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah penerapan otonomi daerah di Provinsi NTT dapat menekan angka kemiskinan? Data BPS pada semester I 2022 mencatat jumlah penduduk miskin di NTT berada pada urutan lima terbesar dibanding provinsi lain di Indonesia. Dimensi kemiskinan

bersifat multidimensi dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial ekonomi. Aspek ekonomi dapat digambarkan dengan pendapatan daerah dan dana transfer pusat ke daerah (Bird, 1993). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Secara umum, di Indonesia, desentralisasi fiskal masih dipahami sebagai pengeluaran/belanja dengan sumber pendanaan utama yang bergantung pada transfer dana pusat. Tak dapat dihindari bahwa 30 persen dari struktur belanja daerah dialokasikan bagi belanja pegawai. Selain itu, pajak dari yang menjadi salah satu pemasukan utama bagi pemerintah masih sangat rendah. Di lain pihak, kolaborasi fiskal pusat dan daerah belum optimal, masih ada program pusat-daerah yang bertolak belakang (Kemenkeu, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan. Yao (2007) menganalisa data pengurangan kemiskinan dan desentralisasi fiskal di 150 negara dari Tahun 1975 hingga 2000 dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada dua variabel tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sepulveda & Maerines-Vasquez (2010) yang merekomendasikan dari hasil penelitian mereka bahwa dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam mendistribusikan anggaran karena desentralisasi fiskal ternyata berdampak negatif terhadap program penurunan kemiskinan. Dapat disimpulkan dari

beberapa penelitian ini bahwa pengaruh desentralisasi fiskal bersifat kontekstual dan bergantung pada banyak aspek.

Oleh karena itu, dipandang penting untuk mengevaluasi dampak otonomi daerah khususnya desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di NTT. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan otonomi di daerah. Penelitian ini akan menelaah secara empiris bagaimana aspek keuangan daerah dan beberapa aspek sosial lainnya mempengaruhi kemiskinan di NTT.

2. Metodologi

Terdapat pengaruh langsung dan tak langsung antara proses desentralisasi dengan kemiskinan (Sepulveda & Maerines-Vasquez, 2010). Pengaruh tidak langsung bergantung pada faktor-faktor sosial ekonomi tertentu. Dalam penelitian ini, selain desentralisasi fiskal, beberapa faktor sosial ekonomi yang digunakan diantaranya akses terhadap air bersih yang dapat mewakili aspek kondisi infrastruktur, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran dan sanitasi layak.

Bahan dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel Tahun 2017-2021 yang bersumber dari publikasi BPS. Terdapat 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang menjadi unit penelitian. Variabel terjelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

	Variabel	Deskripsi
Y	Persen miskin	Persentase penduduk miskin
X1	PAD_Pend	Rasio PAD terhadap total pendapatan(%)
	PAD_Belnj	Rasio PAD terhadap total belanja(%)
X2	Akses Air Bersih	Persen Ruta yang dapat mengakses air bersih
X3	Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)
X4	Sanitasi	Persen ruta yang memiliki sanitasi layak
X5	TPT	Tingkat Pengangguran terbuka

Masing-masing variabel dalam penelitian ini dijelaskan sesuai dengan konsep definisi BPS (2022) sebagai berikut:

1. Persen penduduk miskin yaitu persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2. Desentralisasi fiskal didekati dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja pemerintah daerah. *Proxy* ini menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya. Pengukuran desentralisasi cukup rumit karena belum ada pengukuran terbaik atas desentralisasi. Sebagian besar penelitian menggunakan rasio dari pendapatan dan belanja daerah terhadap total pendapatan dan belanja daerah, walaupun tingginya rasio ini belum tentu merefleksikan kemandirian fiskal daerah (Thornton, 2007). Indikator ini juga digunakan dalam analisis dengan pertimbangan sulitnya mendapatkan indikator menyeluruh yang dapat menjelaskan desentralisasi fiskal. Selain itu, keterbatasan data menjadi pertimbangan lainnya.
3. Akses air bersih, sejak tahun 2019 mengacu pada metadata *Sustainable Development Goals (SDGs)* di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air bersih jika sumber air utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi meliputi sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi.
4. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Atau dengan kata lain, tingkat kepadatan penduduk membandingkan jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Adanya

ketidakmerataan sebaran penduduk terlihat melalui kepadatan penduduk.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
6. Sanitasi mengacu pada metadata SDGs terbaru dimana rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di Mandi Cuci Kakus (MCK) Komunal.

Metode Analisis Data

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Sebelum membahas data panel, perlu dipahami konsep dari data *time series* dan data *cross-section*. Data *time series* adalah data dari suatu individu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sedangkan data *cross-section* adalah data pada satu titik waktu tertentu yang dikumpulkan dari banyak unit individu. Sehingga data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross-section* dimana data umumnya diperoleh dengan mengamati beberapa unit individu dalam kurun waktu tertentu (Gujarati, 2004). Dalam Greene (2003) juga dijelaskan bahwa data panel merupakan kumpulan data yang menggabungkan data *time series* dan data *cross-section* yang umum terjadi pada bidang ekonomi.

Dalam Baltagi (2005) dijelaskan keuntungan menggunakan data panel diantaranya:

1. Dapat mengontrol heterogenitas individu yang merupakan kemampuan untuk mengontrol pengaruh dari efek individu agar memperoleh hasil estimasi yang tidak bias, dimana hal ini tidak dapat dikontrol oleh data *cross-section* dan *time series*.
2. Informasi yang diperoleh lebih luas karena merupakan kombinasi antara data *cross-section* dan *time series*, memperbesar derajat bebas, lebih efisien, variabilitas yang lebih banyak, serta mengurangi kolinearitas di antara variabel.
3. Data panel lebih baik dalam mempelajari *dynamics of adjustment*, yaitu dapat digunakan dalam melihat keadaan dari unit *cross-section* dalam suatu waktu tertentu yang dapat dibandingkan kondisinya dengan waktu lainnya.
4. Data panel lebih baik untuk mengidentifikasi serta mengukur efek yang tidak dapat dideteksi dalam data *cross-section* murni maupun *time series* murni.
5. Model data panel memungkinkan kita untuk membentuk dan menguji model yang berperilaku lebih rumit dibandingkan data *cross-section* ataupun *time series* biasa.

Secara umum tahapan analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Estimasi regresi data panel meliputi

tiga pendetakan yang sering digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

- a. *Common Effect Model* (CEM) yang menggabungkan (*pooled*) dari seluruh data *cross-section* dan data *time series* sehingga disebut dengan *Pooled Regression Model* (Gujarati, 2004). Persamaan CEM dapat ditulis dalam persamaan berikut (Greene, 2003):

$$y_{it} = \alpha_{it} + \beta X_{it} + e_{it}$$

Dimana:

y_{it} = unit *cross-section* ke- i untuk periode waktu ke- t

α_{it} = intersep merupakan efek grup/individu dari unit *cross-section* ke- i untuk periode waktu ke- t

β = vektor konstanta berukuran $1 \times n$ dengan n banyaknya variabel independent.

X_{it} = menunjukkan vektor observasi pada variabel independent berukuran $1 \times n$

e_{it} = komponen error unit data *cross-section* ke- i untuk periode waktu ke- t

$i = 1, 2, \dots, n$

$t = 1, 2, \dots, t$

- b. *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang dapat mengontrol perbedaan antar individu (*individuality*) melalui perbedaan intersep antar unit *cross-section* dengan menggunakan teknik variabel *dummy*, namun *slope* tetap diasumsikan konstan atau tidak berbeda antar unit *cross-*

section atau antar waktu. Model ini dalam estimasi disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV) (Gujarati, 2004). Persamaan FEM adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{it}^1 + \dots + \beta_j X_{it}^j + e_{it}$$

- c. *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik antar unit *cross-section* (efek individu) dan perbedaan antar waktu yang dimasukkan dalam komponen *error* pada model (Baltagi, 2005). Persamaan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{it} + \dots + \beta_n X_{it} + e_{it}$$

2. Pemilihan model regresi data panel terbaik. Terdiri dari beberapa uji yaitu:

- a. Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan jenis model yang akan dipilih antara CEM atau FEM. Hipotesis dalam menentukan model terbaik adalah apabila nilai *cross-section chi-square* < nilai signifikan (0,05), maka FEM akan dipilih. Sebaliknya, jika nilai *cross-section chi-square* > nilai signifikan, maka CEM yang dipakai dan uji hausman tidak diperlukan.
- b. Uji Hausman merupakan uji yang dipakai untuk memilih antara FEM dan REM. Hipotesis dalam penentuan model terbaik ini apabila nilai *cross-section random* < nilai signifikan (0,05), maka FEM akan dipilih. Sebaliknya, jika nilai

cross-section random > nilai signifikan, maka REM yang dipilih.

- c. Uji Struktur *Variance-Covarians Residual* menggunakan LM (*Lagrange Multiplier*). Uji ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah struktur *variance-covariance* residual memenuhi asumsi homoskedastisitas atau heterostedastis. Kondisi residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan disebut homoskedastik sedangkan kondisi residual yang terbentuk memiliki varian yang tidak konstan disebut heteroskedastik.
- d. Apabila terdeteksi heteroskedastisitas maka uji lanjutannya adalah uji *Lamda LM*. Dengan uji *Lamda LM* dapat diketahui adanya korelasi atau tidak. Apabila ada maka menggunakan *Feasible Generalized Least Squared* atau *Seamingly Unrelated Regression* (FGLS/SUR), sedangkan tidak ada korelasi menggunakan GLS/WLS.
- e. Uji Asumsi Klasik dalam hal ini hanya menguji multikolinearitas dengan pertimbangan sesuai dengan Ajija dkk (2011) menyimpulkan bahwa "keunggulan lain pada data panel yaitu data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik", maka data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik seperti normalitas atau autokorelasi. Selain uji normalitas dan uji autokorelasi, uji

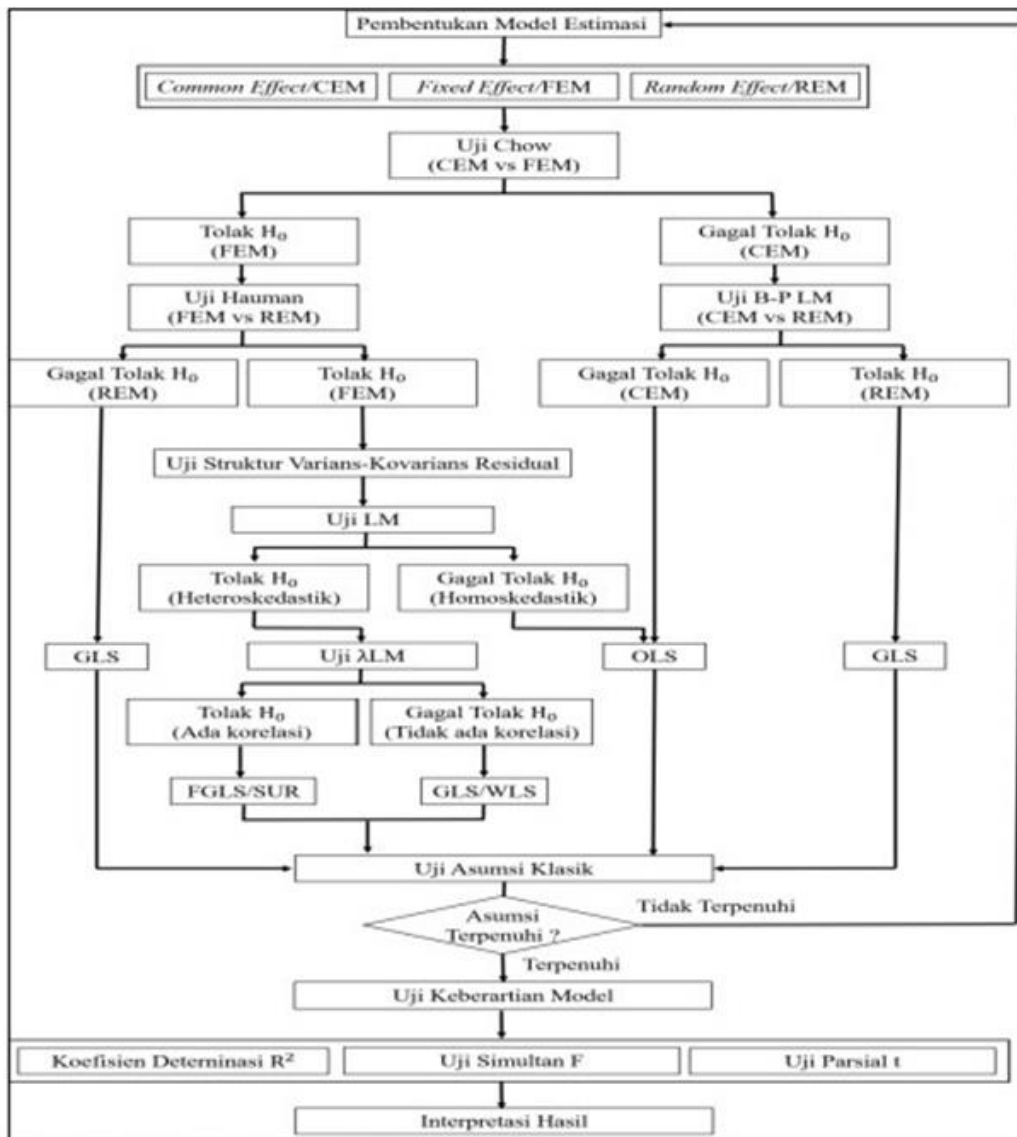
heteroskedastik juga tidak dibutuhkan karena metode estimasi menggunakan metode FGLS/SUR. Satu-satunya asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji multikonlinearitas, hal ini disebabkan karena variabel bebas lebih dari satu variabel.

memeriksa persamaan regresi meliputi uji serentak (Uji F) dan uji parsial (Uji t)

3. Uji keberartian model dengan

4. Interpretasikan estimasi koefisien dari persamaan model yang diperoleh. Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, prosedur analisis regresi data panel secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Penelitian



Sumber: data olahan

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Uraian statistik deskriptif tergambar pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Uraian	Mean	Max	Min	Std dev	Obs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
miskin	21,94	36,01	8,96	7,17	110
PADpend	7,26	19,81	3,58	3,05	110
PADbelnj	7,13	19,63	3,15	3,14	110
Air bersih	76,99	99,5	1,06	16,80	110
Kpadatan	229,46	2510,82	35	479,61	110
Sanitasi	85,09	99,37	49,12	11,27	110
TPT	3,41	12,5	0,5	2,05	110

Terlihat dari tabel 2, rata-rata penduduk miskin adalah 21,94 persen pada periode 2017-2021 dimana angka tertinggi adalah 36,01 persen dan terendah 8,96 persen. Rasio PAD terhadap pendapatan berada pada rentang 3,58 persen hingga 19,81 persen sedangkan PAD terhadap belanja berkisar antara 3,15 persen hingga 19,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah belum optimal memaksimalkan pemasukan dari potensi lokal yang dimiliki. Rata-rata 76,99 persen penduduk telah dapat mengakses air bersih. Kepadatan penduduk berkisar antara 35 jiwa/km² sampai 2510 jiwa/km². Dengan rata-rata kepadatan 229 jiwa/km². 85 persen penduduk juga telah memiliki sanitasi yang layak dengan rentang berkisar antara 49,12 persen hingga 99,37 persen. Tingkat pengangguran di NTT juga berkisar antara 0,5 persen hingga 12,5 persen dalam rentang tahun 2017-2021.

Pemilihan Model

Secara umum, permodelan CEM terlihat pada tabel 3 dan 4 berikut ini.

Tabel 3. Persamaan CEM untuk persamaan PAD terhadap Pendapatan

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	52,59802	4,339168	12,12168	0
X1	-26,801	21,55325	-1,24348	0,216
X2	-0,19128	0,033837	-5,653	0
X3	-0,00356	0,001777	-2,00018	0,048
X4	-0,14964	0,05234	-2,85904	0,005
X5	-0,12349	0,38386	-0,32169	0,748
R-squared			0,517469	
Adjusted R-squared			0,49427	
S.E. of regression			5,102256	
F-statistic			22,30604	
Prob(F-statistic)			0	

Tabel 4. Persamaan CEM untuk persamaan PAD terhadap Belanja

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	52,41057	4,221795	12,41429	0
X1	-26,8757	20,3846	-1,31843	0,190
X2	-0,19014	0,03390	-5,60777	0
X3	-0,00349	0,00177	-1,96237	0,053
X4	-0,14879	0,05187	-2,86827	0,005
X5	-0,12624	0,38272	-0,32985	0,742
R-squared			0,518345	
Adjusted R-squared			0,495189	
S.E. of regression			5,097621	
F-statistic			22,3845	
Prob(F-statistic)			0	

Selanjutnya adalah hasil regresi data panel FEM yang tergambar pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Persamaan FEM untuk persamaan PAD terhadap Pendapatan

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	24,36398	0,91139	26,7329	0
X1	12,01647	2,43770	4,92944	0
X2	0,007394	0,00409	-1,80971	0,074
X3	0,000612	0,00225	0,272216	0,7861
X4	-0,031761	0,00869	-3,65306	0,0005
X5	-0,048011	0,03950	-1,21534	0,2277
R-squared			0,99805	
Adjusted R-squared			0,99743 9	
S.E. of regression			0,36312	
F-statistic			1633,471	
Prob(F-statistic)			0	

Tabel 6. Persamaan FEM untuk persamaan PAD terhadap Belanja

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	24,53989	0,84341	29,09613	0
X1	12,39776	2,161176	5,736579	0
X2	-0,006781	0,00392	-1,73045	0,0873
X3	-0,00014	0,00213	-0,06588	0,9476
X4	-0,032344	0,00830	-3,8957	0,0002
X5	-0,052774	0,03803	-1,38784	0,1689
R-squared			0,998194	
Adjusted R-squared			0,99762 9	
S.E. of regression			0,34937 5	
F-statistic			1764,785	
Prob(F-statistic)			0	

Sedangkan untuk REM pada tabel 7 dan 8 berikut ini.

Tabel 7. Persamaan REM untuk persamaan PAD terhadap Pendapatan

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	25,32718	1,349721	18,76475	0
X1	10,81004	2,38528	4,531987	0
X2	-0,00584	0,00395	-1,47783	0,143
X3	-0,00268	0,00157	-1,70649	0,091
X4	-0,03385	0,00866	-3,90806	0,001
X5	-0,06609	0,03849	-1,71721	0,089
R-squared			0,365852	
Adjusted R-squared			0,335364	
S.E. of regression			0,393953	
F-statistic			11,99993	
Prob(F-statistic)			0	

Tabel 8. Persamaan REM untuk persamaan PAD terhadap Belanja

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	25,31974	1,31963	19,187	0
X1	11,65589	2,138757	5,449845	0
X2	-0,00554	0,003801	-1,45816	0,1478
X3	-0,0029	0,001529	-1,89873	0,0604
X4	-0,03392	0,008279	-4,0974	0,0001
X5	-0,06842	0,037085	-1,8448	0,0679
R-squared			0,405204	
Adjusted R-squared			0,376608	
S.E. of regression			0,378325	
F-statistic			14,16997	
Prob(F-statistic)			0	

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menganalisa hasil dari beberapa uji, diantara uji Chow dan uji Hausman. Berikut adalah hasil dari pengujian tersebut:

Uji Chow

Tabel 9. Hasil Uji Chow Persamaan PAD terhadap Pendapatan

Uji Efek (1)	Nilai (2)	d.f (3)	Prob. (4)
<i>Cross-section F</i>	973,8217	(21,83)	0
<i>Cross-section Chi-Square</i>	606,2056	21	0

Sesuai hipotesis H₀: CEM yang sesuai dan H₁: FEM yang sesuai, maka dengan nilai Prob. < 0,05 maka Tolak H₀ yang berarti model FEM yang sesuai.

Tabel 10. Hasil Uji Chow persamaan PAD terhadap belanja

Uji Efek (1)	Nilai (2)	d.f (3)	Prob. (4)
<i>Cross-section F</i>	1050,354	(21,83)	0
<i>Cross-section Chi-Square</i>	614,4952	21	0

Sesuai hipotesis H₀: CEM yang sesuai dan H₁: FEM yang sesuai, maka dengan nilai Prob. < 0,05 maka Tolak H₀ yang berarti model FEM yang sesuai.

Uji Hausman

Tabel 11. Hasil Uji Hausman persamaan PAD terhadap pendapatan

Kriteria (1)	X ² (2)	d.f X ² (3)	Prob. (4)
<i>Cross-section random</i>	23,41164	5	0,0003

Dari tabel 11 terlihat sesuai hipotesis H₀: REM yang sesuai dan H₁: FEM yang sesuai, maka dengan nilai Prob. < 0,05 maka Tolak H₀ yang berarti model FEM yang sesuai.

Tabel 12. Hasil Uji Hausman persamaan PAD terhadap belanja

Kriteria (1)	X ² (2)	d.f X ² (3)	Prob. (4)
<i>Cross-section random</i>	22,95003	5	0,0003

Dari tabel 12 terlihat sesuai hipotesis H₀: REM yang sesuai dan H₁: FEM yang sesuai, maka dengan nilai Prob. < 0,05 maka Tolak H₀ yang berarti FEM yang sesuai.

Uji LM

Walaupun kesimpulan dari uji sebelumnya bahwa FEM yang di ambil dan tidak memerlukan uji LM namun untuk melihat pemilihan estimator struktur homoskedastisitas atau heteroskedastisitas diperlukan uji LM tersebut. Hasil uji LM untuk persamaan PAD terhadap pendapatan dan belanja menunjukkan nilai chi-squared sebesar 32,67 yang lebih kecil dari LM-Test (54,008) dapat disimpulkan bahwa struktur varians-kovarian residual bersifat heteroskedastik sehingga dilanjutkan dengan uji *likelihood ratio* atau *lambda* LM untuk menentukan metode estimasi terbaik.

Uji *Lambda* LM

Hasil uji *lambda* LM untuk persamaan PAD terhadap pendapatan didapat hasil *lambda* LM (919,2377) lebih besar dari nilai *chi-squared* (267,455) sehingga disimpulkan metode estimasi yang tepat adalah FGLS/SUR. Sedangkan untuk persamaan PAD terhadap belanja hasil uji *lambda* LM menunjukkan nilai *lambda* LM (164,2077) lebih kecil dari *chi-squared* (267,455)

sehingga disimpulkan metode estimasi yang digunakan adalah GLS/WLS.

Regresi Data Panel terbaik untuk persamaan PAD terhadap pendapatan

Regresi data panel PAD terhadap pendapatan sesuai dengan hasil uji chow dan hausman didapat model terbaik berdasarkan FEM, dengan metode estimasi yang dipilih dari uji lambda adalah FGLS/SUR menghasilkan persamaan sebagai berikut:

Tabel 13. Persamaan regresi data panel untuk PAD terhadap Pendapatan

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	25,45432	0,95464	26,66372	0
X1	7,996061	2,02456	3,949538	0,0002
X2	-0,00329	0,00090	-3,64038	0,0005
X3	-0,00121	0,00067	-1,78732	0,0775
X4	-0,04034	0,00877	-4,59986	0
X5	-0,03785	0,02346	-1,61352	0,1104
R-squared			0,999278	
Adjusted R-squared			0,999051	
S.E. of regression			0,344691	
F-statistic			4415,881	
Prob(F-statistic)			0	

Regresi Data Panel terbaik untuk persamaan PAD terhadap Belanja

Regresi data panel PAD terhadap belanja sesuai dengan hasil uji chow dan hausman didapat model terbaik berdasarkan FEM dengan metode estimasi yang dipilih dari uji λ GLS/WLS menghasilkan persamaan sebagai berikut:

Tabel 14. Persamaan regresi data panel untuk PAD terhadap belanja

Var	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	24,93988	0,51455	48,46968	0
X1	9,025596	1,78647	5,052186	0
X2	-0,00363	0,00147	-2,47042	0,0155
X3	-0,0016	0,00080	-1,99341	0,0495
X4	-0,03326	0,00556	-5,97722	0
X5	-0,04911	0,02124	-2,3124	0,0232
R-squared			0,999263	
Adjusted R-squared			0,999032	
S.E. of regression			0,335706	
F-statistic			4328,436	
Prob(F-statistic)			0	

Uji Asumsi klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas (tidak melebihi 0,80) sehingga menurut (Ghozali, 2013) disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji keberartian model

Persamaan PAD terhadap pendapatan dan belanja didapat uji F dengan nilai $Prob(F-Statistic)$ sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05. Artinya menolak H_0 atau semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Atau dengan kata lain pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diinterpretasi melalui model ini.

Persamaan PAD terhadap pendapatan didapat uji t untuk masing-masing variabel bebas dengan nilai

Prob(F-Statistic) sebesar 0,00 yang lebih kecil dari signifikan berarti variabel tersebut mempengaruhi variabel terikat. Rasio PAD terhadap pendapatan memiliki nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$, air bersih memiliki nilai probabilitas $0,00 < 0,05$, kepadatan penduduk memiliki nilai probabilitas $0,077 > 0,05$, sanitasi memiliki nilai probabilitas $0,0 < 0,05$ dan TPT memiliki nilai probabilitas $0,11 > 0,05$. Dapat diartikan bahwa secara individu, variabel rasio PAD terhadap pendapatan, air bersih, dan sanitasi berpengaruh terhadap kemiskinan di NTT. Sedangkan kepadatan penduduk dan pengangguran ternyata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

Persamaan PAD terhadap belanja didapat uji t untuk masing-masing variabel bebas dengan nilai *Prob(F-Statistic)* sebesar 0,00 yang lebih kecil dari signifikan berarti variabel tersebut mempengaruhi variabel terikat. Rasio PAD terhadap belanja memiliki nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$, air bersih memiliki nilai probabilitas $0,00 < 0,05$, kepadatan penduduk memiliki nilai probabilitas $0,003 < 0,05$, sanitasi memiliki nilai probabilitas $0,002 < 0,05$ dan TPT memiliki nilai probabilitas $0,02 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa secara individu, variabel rasio PAD terhadap belanja, air bersih, kepadatan dan sanitasi dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di NTT.

Dari dua variabel desentralisasi fiskal baik itu rasio PAD terhadap pendapatan maupun rasio PAD terhadap belanja

mengindikasikan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal daerah di NTT tidak dapat menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya untuk variabel air bersih, sanitasi, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di NTT, dimana semakin baik akses terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi, kepadatan penduduk serta tingkat pengangguran yang rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik (diindikasikan dengan penurunan penduduk miskin).

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis menyimpulkan bahwa indikator desentralisasi fiskal (rasio PAD terhadap pendapatan dan belanja) ternyata berpengaruh positif terhadap kemiskinan di NTT. Hal ini menjadi indikasi bahwa semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah belum tentu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Beberapa hal yang mempengaruhi seperti kesenjangan antarwilayah, pola kemiskinan penduduk, kinerja dan kapasitas pemerintah daerah serta faktor sosial ekonomi politik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat membenahi pengelolaan keuangan daerah khususnya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dan penggunaannya untuk kepentingan yang besar pada belanja pegawai seharusnya dapat mendorong

pelayanan publik yang semakin baik. Belanja daerah juga dapat difokuskan pada perbaikan kesehatan dan pendidikan non formal masyarakat untuk mendorong tercapainya kualitas hidup yang lebih baik.

2. Selain rasio PAD terhadap pendapatan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Prov NTT. Dengan perbaikan fasilitas/infrastruktur dari desa, memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu optimalisasi dana desa baik itu yang dialokasikan daerah maupun pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
3. Apabila dilihat dari rasio PAD terhadap belanja, seluruh komponen pendukung seperti akses terhadap air bersih, kepadatan penduduk, sanitasi layak dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Prov NTT. Dengan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengendalian kelahiran, transmigrasi dan penataan kota, serta membuka lapangan pekerjaan dapat memperbaiki kesejateraan penduduk.

Daftar Pustaka

- Ajija, dkk.2011. Cara cerdas menguasai evIEWS. Jakarta: Salemba Empat
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd Edition. New York: John Wiley and Sons Ltd.
- Bird, R.M.(1993). *Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization*. *National tax journal*. 207-227
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Greene, William H. (2003). *Econometric Analysis: 5th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometric: 4th Edition*. New York: Mc.Graw Hill.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta.
- Kusumaningrim, R.S.D.2013. *Link of fiscal desentralisation to poverty reduction: Indonesian context*. *Jurnal economics*, (9)2,116-129.
- ntt.bps.go.id. Konsep Metodologi Indikator Statistik. Diakses pada Tanggal 20 November 2022. Dari <https://ntt.bps.go.id/subject/29/perumahan.html#subjekViewTab1>
- SEADI.2013. *Provincial Poverty Rates in Indonesia*. USAID
- Sepulveda, C.F., & Martinez-Vasquez, J. 2010. *The consequences of fiscal decentralization on poverty and income inequality*. Georgia State University.
- Shahzas, S. & Yasmin, 2016. *Does fiscal deentralisation matter for poverty*

and income inequality in Pakistan?. The Pakistan Development Review, 781-802.

Thornton, J. 2007. *Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. Journal of urban economics. 61(1), pp 64-70.*

Wasistiono, Sadu, 1997, Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Badan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000, Bandung: SESKOAD.

Yao, G.A. (2007). *Fiscal decentralization and poverty reduction outcomes: Theory and evidence.*